

PENGARUH RESTRUKSISASI HUTANG DAN PENDAPATAN DAERAH TERHADAP PELAPORAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN MAROWALI

Fatza Dg.Lonre¹, Sutardjo Tui², Nurfaidah³

^{1,2,3}Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar

ABSTRACT

The researched aimed to analysis the impact of liability restructurization and regional income toward the report of regional finance Morowali Regency and to analysis the dominant impact toward the report of regional finance Morowali Regency. Methodology of research with research location applied on the Regional Government Morowali Regency, with population and sample namely the regional financial statement 2014 - 2018. Data obtained to analysis in descriptively which description of research data, further of in quantitatively through Linier Multiple Regression. The result of research to found; the liability restructurization have impact toward report of regional finance in Morowali Regency. That mean the liability restructurization as the decision which take for payment with the criteria which appointment about liability before it which doing by regional government. The regional income have impact toward report of regional finance in Morowali Regency. The obtained of income sources to managed with good will get contribution in grow of regional financial with the financial report which efficient and effective.

Keywords: Competence, Local Wisdom, Performance by Employee

PENDAHULUAN

Aplikasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, telah terjadi pelimpahan kewenangan yang semakin luas kepada pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang diaktualisasikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, secara aktual juga didukung Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Manajemen Keuangan Daerah.

Fenomena yang terlihat pada Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali di dalam melakukan kegiatan pembangunan pemerintahan membutuhkan pengalokasian dana baik bersifat dana pembangunan maupun dana rutin yang harus diupayakan dan diperoleh dalam setiap tahun. Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali dalam mendapatkan sumber pendapatan daerah proporsi yang paling besar adalah kontribusi

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Eksistensi pendapatan daerah memberi dampak terhadap pelaporan keuangan daerah. Karena itu, pendapatan daerah selalu kebijakan dan pertimbangan bagi pemerintah daerah untuk senantiasa dimonitoring dan dievaluasi dalam rangka berdampak baik terhadap pelaporan keuangan daerah. Berarti restrukturisasi hutang dan pendapatan daerah secara langsung maupun tidak langsung berdampak pada laporan keuangan daerah khususnya mengenai kegiatan pelaporan yang dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel atas penggunaan dana keuangan pemerintah daerah. Pengelolaan keuangan daerah menjadi penting bagi daerah dalam mempertanggungjawabkan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Menilai dampak restrukturisasi hutang dan pendapatan daerah dapat dilihat pelaporan keuangan PEMDA sebagaimana pendapat Suparmoko (2016), bahwa menilai laporan keuangan pemerintah daerah dari dampak restrukturisasi hutang dan pendapatan daerah tercermin pada penilaian laporan realisasi anggaran, neraca, laporan alur kas dan catatan atas laporan keuangan yang dimiliki pemerintah daerah. Penilaian ini harus kredibel

dan dapat dipertanggungjawabkan. Inti dari laporan realisasi anggaran untuk menyajikan ikhtisar sumber alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi, neraca menggambarkan posisi laporan keuangan, laporan arus kas menyajikan informasi tentang kas dan aktivitasnya, serta catatan atas laporan keuangan berupa penjelasan naratif atau rincian dari pelaporan keuangan.

Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah: 1) Apakah dampak dari restrukturisasi hutang dan pendapatan daerah terhadap pelaporan keuangan daerah Kabupaten Morowali? 2) Diantara restrukturisasi hutang dan pendapatan daerah, manakah yang dominan memberikan dampak terhadap pelaporan keuangan daerah Kabupaten Morowali?

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Menganalisis dampak dari restrukturisasi hutang dan pendapatan daerah terhadap pelaporan keuangan daerah Kabupaten Morowali. 2) Menganalisis diantara restrukturisasi hutang dan pendapatan daerah, manakah yang dominan memberikan dampak terhadap pelaporan keuangan daerah Kabupaten Morowali.

TINJAUAN LITERATUR

Anggara (2016), mendefinisikan restrukturisasi hutang sebagai pembayaran atas hutang sesuai syarat yaitu lebih ringan karena keberadaan konsesi khusus antara kreditur kepada debitur dan restrukturisasi hutang merupakan suatu proses untuk merestruktur hutang bermasalah dengan tujuan untuk memperbaiki posisi keuangan.

Restrukturisasi hutang hanya sebagian saja dengan melakukan pengurangan suku bunga dan jumlah bunga yang harus dibayar, namun jika kondisi debitur sangat lemah, maka kreditur berkenan memberi keringanan sebagai bentuk restrukturisasi.

Restrukturisasi sebagai *downsizing* atau *delayering*, dengan melakukan pengurangan tenaga kerja, atau disebut juga dengan memperkecil organisasi untuk memperbaiki efisiensi dan efektivitas dalam struktur organisasi (David, 2007).

Restrukturisasi sebagai jalan keluar untuk organisasi yang sulit berkembang, yang diharapkan melalui strategi ini organisasi menjadi kuat dengan melakukan transformasi. Untuk itu diperlukan tim manajemen dengan

wawasan yang maju, dapat melihat kapan organisasi ada pada titik *undervalued*. Bramantyo (2004), restrukturisasi bertujuan untuk memaksimalkan kinerja organisasi agar organisasi dapat *go public*, maka dikelompokkan menjadi tiga jenis yaitu: a) restrukturisasi portofolio/aset dengan menyusun portofolio organisasi agar kinerja organisasi semakin baik, b) Restrukturisasi modal melalui penyusunan ulang komposisi modal organisasi agar kinerja organisasi menjadi sehat. Kesehatan organisasi dapat diukur berdasar; 1) rasio tingkat efisiensi (*efficiency ratio*), 2) tingkat efektifitas (*effectiveness ratio*), 3) profitabilitas (*profitability ratio*), 4) tingkat likuiditas (*liquidity ratio*), tingkat perputaran aset (*asset turnover*), 5) *leverage ratio* dan *market ratio*. Selain itu, tingkat kesehatan dapat dilihat dari profil risiko tingkat pengembalian (*risk return profile*), c) Restrukturisasi manajemen dan organisasi, merupakan penyusunan 1) ulang komposisi manajemen, 2) struktur organisasi, 3) pembagian kerja, 4) sistem operasional, dan 5) berkaitan dengan masalah manajerial dan organisasi.

Menurut Hasbullah (2006), pendapatan daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan kelulusan pada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Salah satu upaya untuk melihat kemampuan daerah dari segi keuangan daerah untuk mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat dengan melihat komposisi dari penerimaan daerah yang ada. Semakin besar komposisi pendapatan asli daerah, maka semakin pula kemampuan pemerintah daerah untuk memikul tanggungjawab yang lebih besar. Penerimaan PAD yang besar berdampak kepada masyarakat dalam hal kelancaran pembangunan meliputi; pembangunan jalan, pembangunan fasilitas umum, dan fasilitas lainnya.

Dalam upaya memperbesar peran pemerintah daerah dalam pembangunan, pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam membiayai kegiatan operasional rumah tangganya. Berdasarkan hal tersebut, dapat dilihat bahwa pendapatan asli

daerah tidak dapat dipisahkan dengan belanja daerah, karena adanya saling terkait dan merupakan satu alokasi anggaran yang disusun dan dibuat untuk melancarkan roda pemerintah daerah (Indarto, 2004).

Laporan keuangan adalah hasil dari setiap perubahan proses pelaporan keuangan yang sesuai dengan aturan dan standar *accounting*, inisiatif manajerial, pengembang dan mekanisme monitoringnya. Hal itu penting untuk dipahami bahwa lingkup laporan keuangan sesuai dengan tujuan dan konsep dari informasi yang diperlihatkan dalam laporan keuangan (Grove, 2015).

Bentuk tanggungjawab dalam pengelolaan sumber daya ekonomi adalah pelaporan keuangan yang terbit dan disusun sesuai standar akuntansi yang berlaku, kemudian dilakukan perbandingan dengan pelaporan periode sebelumnya.

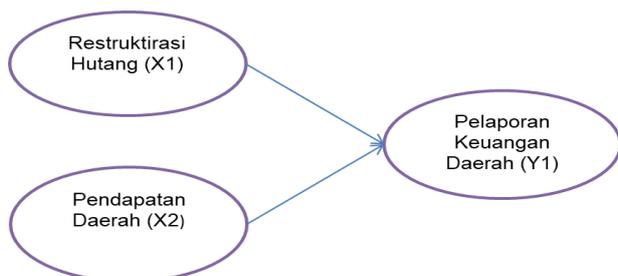
Dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah, dijalankan mengikuti peraturan yang berlaku secara efisien, efektif dan ekonomis, serta transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai asas keadilan, kepatutan dan manfaat yang akan dirasakan oleh masyarakat. Dengan mengacu kepada Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan umum adalah hak dan kewajiban daerah dalam penyelenggaraan pemerintah yang dinilai dengan uang termasuk segala bentuk kekayaan berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.

Adapun penelitian terdahulu, yang dapat dijadikan rujukan adalah sebagai berikut: 1) Yusuf Haryono (2000), Restrukturisasi Hutang melalui Kebijakan *Debt to Equity SWAP* dan Pengaruhnya terhadap Struktur Keuangan PT. X. Hasil penelitian dan analisis terhadap 3 alternatif restrukturisasi hutang menunjukkan bahwa alternatif III yaitu merestrukturisasi hutang melalui kebijakan *debt to equity swap* merupakan alternatif terbaik, karena memberikan biaya modal yang minimal (4,46%) dan memaksimalkan nilai perusahaan (10%), sehingga memungkinkan perusahaan beroperasi dalam rentang struktur keuangan yang optimal. Mengingat nilai tukar rupiah terhadap US Dollar cenderung melemah, disarankan agar PT. Sarana Karang Indah Permai sesegera mungkin merestrukturisasi hutangnya dengan kreditur, dengan mengkonversi hutangnya menjadi penyertaan modal". 2) Harinoto (2013), Analisis

Pendapatan Asli Daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Hasil penelitian menemukan bahwa sumber-sumber potensi keuangan daerah sektor pajak daerah, trend penerimaan terjadi peningkatan dari tahun 2011 ke tahun 2013, baik dari sisi target yang diharapkan maupun realisasinya, dengan rata-rata prestasi yang dicapai sebesar 128.50%. Retribusi daerah mengalami trend peningkatan yang relatif baik, dari target ke target maupun realisasi ke realisasi. Namun masuk kategori sangat fluktuasi dilihat dari target ke realisasi. Prestasinya rata-rata capaian 91.98%. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, trendnya mengalami peningkatan, baik dari sisi target ke target maupun dari sisi realisasi ke realisasi. Namun sisi target ke realisasi belum memenuhi target yang ditetapkan. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, mengalami fluktuasi, perkembangan sebesar 132.88%. Kontribusi terhadap Pendapatan Daerah memiliki rata-rata sebesar 9.117 %. Artinya sumbangan yang diberikan sebesar 9.117%. Selebihnya sebesar 90.18 % disumbang oleh sumber-sumber lain selain yang berasal dari PAD. Sehingga jika ditinjau dari tingkat kemandirian daerah, maka hasil perhitungan diatas, menunjukkan tingkat kemandirian yang masih sangat minim.

Kerangka konseptual diperlukan untuk melakukan sebuah desain mengenai variabel yang digunakan dalam penelitian baik berupa variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas pada penelitian ini adalah restrukturisasi hutang (X_1) dan pendapatan daerah (X_2). Variabel terikat yaitu pelaporan keuangan daerah (Y). Restrukturisasi hutang meliputi restrukturisasi portofolio/aset, modal dan manajemen/organisasi. Pendapatan daerah terdiri atas pendapatan asli daerah, retribusi daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Sedangkan pelaporan keuangan berupa laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Berdasarkan hal tersebut, kemudian dituangkan dalam kerangka konseptual penelitian sebagai berikut:

Gambar 1. Model Penelitian



Sumber: Fatza (2019)

Dari gambar 1, maka hipotesis yang dapat diajukan adalah sebagai berikut: 1) Restruktisasi hutang dan pendapatan daerah memberikan dampak terhadap pelaporan keuangan daerah Kabupaten Morowali. 2) Perolehan pendapatan daerah dominan memberikan dampak terhadap pelaporan keuangan daerah Kabupaten Morowali.

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian di Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali. Alasan pemilihan lokasi ini karena ingin melihat dampak restrukturisasi hutang dan pendapatan daerah terhadap pelaporan keuangan daerah di instansi tersebut.

Penelitian kuantitatif yang dirancang untuk menguji hipotesis.

Sumber data yaitu: 1) Data primer adalah data dari instansi terkait yang berkaitan dengan permasalahan penelitian berupa laporan keuangan daerah. 2) Data sekunder adalah data berupa laporan dari Pemerintah Daerah.

Populasi yang digunakan adalah laporan keuangan daerah mulai dari data restrukturisasi hutang, pendapatan dan hasil pelaporan keuangan daerah. Sampel yang ditetapkan selama 3 tahun terakhir (2016–2018) atas laporan restrukturisasi hutang, pendapatan, dan hasil pelaporan keuangan daerah.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 1) Observasi adalah peninjauan secara langsung ke lokasi penelitian untuk mengetahui keadaan atau kondisi sesungguhnya di lapangan guna memperoleh informasi berkaitan dengan data penelitian. 2) Wawancara adalah tanya jawab dalam hal ini peneliti melakukan konfirmasi pada obyek penelitian.

Adapun yang menjadi variabel fokus pada penelitian ini adalah restrukturisasi hutang yaitu pembayaran hutang dengan syarat yang lebih ringan dari ketentuan hutang sebelumnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada pihak pemberi pinjaman, dinilai berdasarkan kewajiban jangka pendek. Pengukuran menggunakan nilai rasio laporan keuangan daerah periode tiga tahun (2016–2018).

Pendapatan daerah adalah perolehan sumber-sumber pendapatan yang dihasilkan oleh pemerintah yang digunakan untuk pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah, dinilai berdasarkan jumlah aset yang dimiliki daerah. Pengukuran menggunakan nilai rasio laporan keuangan daerah periode tiga tahun (2016 – 2018). 4)

Pelaporan keuangan adalah kegiatan pelaporan dalam mempertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel atas penggunaan dana keuangan pemerintah daerah, dinilai berdasarkan laporan realisasi anggaran. Pengukuran menggunakan nilai rasio laporan keuangan daerah periode tiga tahun (2016 – 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi data penelitian penyajian data laporan keuangan Kabupaten Morowali berupa data aset dan data kewajiban serta laporan realisasi anggaran berdasarkan Laporan Keuangan BPS Kabupaten Morowali periode 31 Desember 2014 sampai per 30 Juni 2018.

Di dalam laporan keuangan Kabupaten Morowali untuk periode 2014–2018 jumlah harta (aset) mulai dari: aset lancar, aset tetap dan aset lainnya.

Tabel 1 Aset Daerah Berdasarkan Laporan Keuangan Kabuptaen Marowali 2014-2018

Aset	2014	2015	2016	2017	2018
Aset Lancar	1.103.000	26.172.535	15.208.360	11.423.845	61.824.175
Aset Tetap	3.017.266.269	3.145.213.568	3.045.839.280	2.828.247.648	2.727.541.496
Aset Lainnya	90.667.302	65.567.370	1.206.350	1.206.350	1.206.350
Jumlah Aset	3.109.036.571	3.236.953.473	3.062.253.990	2.840.877.843	2.790.572.021

Sumber : BPS Kabupaten Marowali, 2019

Selain harta (aset) yang disajikan dalam laporan keuangan (posisi keuangan) juga menyajikan informasi jumlah kewajiban

dan modal (ekuitas) entitas. Berikut ini adalah data yang memberikan informasi posisi kewajiban dan ekuitas laporan keuangan BPS Kabupaten Morowali 2014-2018, pada daftar tabel 2 berikut ini:

Tabel 2 Data Kewajiban Laporan Keuangan Kabupaten Morowali 2014-2018

Kewajiban	2014	2015	2016	2017	2018
Kewajiban Jangka Pendek	47.381.440	72.038.773	73.225.375	82.251.357	50.000.000
Ekuitas Dana Lancar	-46.276.440	-	-	-	-
Ekuitas Dana Investasi	3.107.931.571	3.164.914.700	2.989.028.615	2.758.626.486	2.740.572.021
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	3.109.036.571	3.236.953.473	3.062.253.990	2.840.877.843	2.790.572.021

Sumber: BPS Kabupaten Morowali, 2019

Laporan realisasi anggaran diperoleh dari pendapatan dan belanja yang terealisasi. Berikut laporan realisasi anggaran Kabupaten Morowali dalam kurun waktu lima tahun (2014-2018)

Tabel 3 Data Realisasi Laporan Keuangan Kabupaten Morowali 2014-2018

Tahun	Laporan Realisasi Anggaran
2014	2.856.929.132
2015	4.570.771.491
2016	4.462.837.821
2017	4.260.174.897
2018	2.067.103.201

Sumber: BPS Kabupaten Morowali, 2019

Adapun data restrukturisasi hutang, pendapatan, dan pelaporan keuangan diperoleh berdasarkan data BPS Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Morowali Utara sebagai berikut:

Tabel 4 Data Variabel Penelitian

Tahun	Restrukturisasi Hutang (X1)	Pendapatan (X2)	Pelaporan Keuangan (Y)
2014	47.381.440	3.109.036.571	2.856.929.132
2015	72.038.773	3.236.953.473	4.570.771.497
2016	73.225.375	3.062.253.990	4.462.837.821
2017	82.251.357	2.840.877.843	4.260.174.897
2018	50.000.000	2.790.572.021	2.067.103.201

Sumber: BPS Kabupaten Morowali, 2019

Pengelolaan realisasi anggaran diperuntukkan untuk pemenuhan anggaran

belanja, dan realisasi dalam pengelolaannya tidak mencapai target sesuai yang diharapkan, alokasi anggaran belanja harus tepat sasaran. Adapun anggaran belanja yang dialokasikan yaitu meliputi tujuh bagian yaitu bagian umum, bagian pemerintahan umum, bagian kesatuan bangsa, bagian ekonomi pembangunan, bagian hukum, bagian organisasi serta bagian pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan rakyat.

Alokasi anggaran publik ini telah teralokasikan sesuai dengan porsi-porsi anggaran, dengan realisasi dari pengelolaannya sudah proporsi, mengingat alokasi tersebut sering mengalami perubahan sesuai dengan dinamika kebutuhan penggunaan anggaran belanja. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan restrukturisasi hutang dalam pengelolaan anggaran karena target-target pengelolaan anggaran sudah dimanfaatkan untuk berbagai aktivitas kegiatan yang dikelola untuk memberikan informasi keuangan yang transparan kepada publik sesuai dengan ketersediaan anggaran yang telah ditargetkan.

Pengalokasian anggaran belanja telah efisien dari aspek penggunaan anggaran, karena Sekretariat Daerah telah menggunakan anggaran belanja untuk meningkatkan kinerja pemerintah termasuk kinerja pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat atas penggunaan anggaran belanja yang telah teralokasikan sesuai target yang telah ditentukan.

Meskipun dalam pengelolaan efisiensi anggaran belanja ini, realisasinya belum mencapai target yang ditetapkan, namun alokasi pengelolaan anggaran telah tepat sasaran, sehingga dikatakan sudah efisien. Adapun restrukturisasi hutang terhadap pelaporan keuangan daerah menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan. Hal ini terlihat dari pemanfaatan dan penggunaan anggaran yang dikelola, sehingga aktivitas rutin pegawai dalam menjalankan roda pemerintahan tetap berjalan secara dinamis dalam memenuhi pelayanan publik.

Pendapatan daerah berpengaruh terhadap pelaporan keuangan daerah. Realisasi anggaran pendapatan terealisasi dalam berbagai pengalokasian anggaran. Pendapatan daerah yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada dasarnya melaksanakan beberapa fungsi antara lain fungsi alokasi, distribusi dan stabilisasi.

Penerapan ketiga fungsi ini diharapkan dapat memotivasi potensi ekonomi daerah, peningkatan taraf hidup maupun sektor-sektor kegiatan pembangunan lainnya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah juga merupakan rincian lebih lanjut dari Repeta Daerah dan juga Pola Dasar Pembangunan daerah, disebut sebagai rencana tahunan (termasuk rencana keuangan menyangkut penerimaan dan pengeluaran pemerintah dalam satu tahun anggaran). Bila dikaitkan dengan peranan pemerintah daerah, maka pada pokoknya anggaran harus mencerminkan strategi pengeluaran yang rasional baik kuantitatif maupun kualitatif, sehingga akan terlihat adanya: a) Pertanggungjawaban pemungutan sumber-sumber pendapatan daerah oleh pemerintah daerah, misalkan untuk memperlancar proses pembangunan ekonomi. b) Hubungan yang erat antara fasilitas penggunaan dana dan pemasukannya, c) Pola pengeluaran pemerintah yang dapat di pakai sebagai pertimbangan dalam menentukan pola penerimaan yang pada akhirnya menjamin tingkat distribusi penghasilan dalam ekonomi daerah.

Pengelolaan keuangan pemerintah daerah terbagi beberapa satuan yang terpisah, antara lain yaitu : “(a) Sekretaris bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam menyiapkan Anggaran Tahunan, menyetujui dan mengendalikan pengeluaran dan membuat catatan keuangan serta membukukannya; (b) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) bertugas menyusun kebijakan dan program dalam kaitan dengan Anggaran Pembangunan Daerah 5 (Lima) Tahun (Repelita Daerah); (c) dalam lingkungan Sekretariat ada bagian pembangunan yang bertugas sebagai koordinator proyek-proyek yang di biayai dari anggaran pembangunan daerah (dibedakan dari proyek proyek yang dibiayai dengan bantuan pemerintah pusat), dan juga bertanggung jawab memantau pelaksanaan proyek-proyek tersebut dari segi fisik dan keuangan; (e) Dinas Pendapatan Daerah bertanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah dan bertugas memungut berbagai pajak retribusi dan pajak daerah, dari segi jumlah dan jenis penerimaan yang dipungut daerah masing-masing; (f) sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Provinsi sebagai unit kerja memberikan pelayanan kepada Publik dan memfasilitasi kegiatan Dewan, maka bertanggung langsung kepada Kepala

Daerah dan melaporkan hasil Kinerjanya kepada Pimpinan Dewan atas penggunaan anggaran yang diterima dan dikeluarkan serta mengkoordinasikan Kinerjanya melalui Sekretaris Daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan Badan Legislatif yang ikut merumuskan peraturan, meninjau/mengawasi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta merumuskan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang APBD yang disetujui bersama Pimpinan DPRD dan Rancangan Gubernur tentang Penjabaran APBD yang di alokasikan kedalam PPA untuk setiap Program SKPD”.

Tujuan utama pengelolaan keuangan pemerintah daerah ditentukan oleh; a). Tanggungjawab; “pemerintah daerah harus mempertanggung-jawabkan tugas keuangannya kepada lembaga atau orang yang berkepentingan yang sah. Lembaga atau orang itu termasuk Pemerintah Pusat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kepala Daerah dan Masyarakat Umum. Adapun unsur-unsur penting dalam tanggung jawab mencakup keabsahan (setiap transaksi keuangan harus berpangkal pada wewenang hukum tertentu) dan pengawasan (tata cara yang efektif untuk menjaga kekayaan uang dan barang, mencegah penyelewengan, dan memastikan semua pendapatan yang sah benar-benar terpungut, jelas sumbernya dan tepat penggunaannya). b). Mampu memenuhi kewajiban keuangan; Keuangan daerah harus di tata sedemikian rupa sehingga mampu melunasi semua ikatan keuangan, jangka pendek dan jangka panjang. c).Kejujuran; Urusan keuangan harus di serahkan pada pegawai yang jujur, dan kesempatan untuk berbuat curang di perkecil. d). Hasil guna dan daya guna. Artinya, tata cara mengurus keuangan daerah harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan program dapat di rencanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pemerintah daerah dengan biaya serendah-rendahnya dan dalam waktu secepat-cepatnya, e). Pengendalian; Petugas keuangan pemerintah daerah, DPRD dan tugas pengawas harus melakukan pengendalian agar semua tujuan tersebut diatas tercapai. Dalam hal ini agar semua tujuan. Mereka harus mengusahakan agar selalu mendapat informasi yang diperlukan untuk memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran, untuk kemudian dibandingkan dengan rencana dan sasaran.

PENUTUP

Beberapa hal yang dapat disimpulkan berdasarkan hasil dan pembahasan adalah: 1) Restrukturisasi berdampak terhadap pelaporan keuangan daerah Kabupaten Morowali. Ini berarti restrukturisasi hutang sebagai keputusan yang diambil untuk pembayaran hutang dengan syarat yang lebih ringan dari ketentuan hutang sebelumnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada pihak pemberi pinjaman. 2) Pendapatan daerah berdampak terhadap pelaporan keuangan daerah Kabupaten Morowali. Perolehan sumber-sumber pendapatan yang dikelola dengan baik akan memberikan kontribusi pertumbuhan keuangan daerah dengan pelaporan keuangan yang efisien dan efektif.

Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan, maka disarankan: 1) Melakukan penambahan dalam pengukuran keberhasilan restrukturisasi hutang dan pengelolaan laporan keuangan yang baik. 2) Pendapatan asli daerah yang dihasilkan daerah mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan pendapatan daerah maka dari itu kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di masa yang akan datang harus ditingkatkan kembali karena dapat meningkatkan penerimaan daerah yang berarti pemerintah daerah telah memiliki kinerja yang baik dalam mengelola keuangan daerahnya. 3) Menjadi referensi bagi peneliti lanjutan yang ingin meneliti mengenai kompetensi dan kearifan lokal dalam pengembangan karir pada aspek kajian yang lain

DAFTAR PUSTAKA

- A. Talanipa. (2005). Analisis Pelaporan Keuangan Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. *Tesis Manajemen Keuangan. Tidak Dipublikasikan.*
- Anggara, Sahya. (2016). *Administrasi Keuangan Daerah.* Bandung: Pustaka Setia.
- Bramantyo. (2004). *Mengelola Administrasi Keuangan dan Pendapatan Daerah.* Jakarta: Rineka Cipta.
- David, F. (2007). *Performance Financial Appraisal.* London: Kogan Page Limited.
- Due, Hardson. (2010). *The Performance of Financial.* New York: John Wiley and Sons, Summer.
- Grove, Edward E. (2015). *The Measure of Performance Financial.* UK: Oxford.
- Harinoto. (2013). Analisis Pendapatan Asli Daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. *Tesis Manajemen Keuangan Tidak Dipublikasikan.*
- Hasbullah. (2006). *Manajemen Keuangan Daerah.* Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Indarto (2004). *Pentingnya Kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.* Jakarta: Rajawali Press.
- Kansil, Irwan. (2012). *Peran Pemerintah Daerah dalam Manajemen Keuangan Daerah.* Jakarta: Salemba Empat.
- Kasrayansah. (2008). Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Keuangan Daerah pada Pemerintah Daerah di Kota Palopo. *Tesis Manajemen Keuangan Tidak Dipublikasikan.*
- Mardiasmo. (2012). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah.* Yogyakarta: Andi.
- Muhammad Iqbal Aji Pratama. (2018). Dampak Restrukturisasi Perusahaan terhadap Kinerja Keuangan dan Sinergi Perusahaan. *Tesis Manajemen Keuangan Tidak Dipublikasikan.*
- Rini, Susanti. (2012). *Teori dan Praktek Pengelolaan Keuangan Daerah.* Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Sjahdeini, Hamalik, R. (2010). *Pengelolaan Keuangan Daerah.* Jakarta: Bina Aksara.
- Soetrisno, Basir. (2008). *Pengembangan Daerah dan Manajemen Keuangan.* Yogyakarta: Liberty
- Suparmoko. (2015). *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktik.* Edisi Revisi. Yogyakarta: BPFE.
- Supriatna, Soerdarjo. (2009). *Manajemen Keuangan dalam Teori dan Praktek.* Jakarta: Rineka Cipta.
- Sutanto, Sadikin. (2009). *Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Hukum Peraturan Perundang-undangan.* Jakarta: Chandra Pratama.
- Syamsuddin, Alamsyah. (2007). *Konsep Keuangan Daerah.* Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Wasistiono, Adidarmawan. (2006). *Optimalisasi penerimaan keuangan daerah.* Jakarta: Salemba Empat.
- Yani, Ahmad. (2009). *Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.* Jakarta: Rineka Cipta.

Yusuf, Haryono. (2000). Restrukturisasi Hutang melalui Kebijakan Debt to Equity SWAP dan Pengaruhnya terhadap Struktur Keuangan PT. X. *Tesis Manajemen Keuangan. Tidak Dipublikasikan.*